



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

## Implementasi Peraturan Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan Untuk Meningkatkan Kesadaran Literasi Anak Di Purworejo

Novia Dwi Aryani <sup>1</sup>, Sri Wahyuni <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [noviadwiaryani01@gmail.com](mailto:noviadwiaryani01@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [swyuni@staff.uns.ac.id](mailto:swyuni@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b> <b>Implementasi, Perpustakaan, Kesadaran Literasi, Anak.</b></p> <p><b>Vol. 8 No. 3 2024</b></p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak di Kabupaten Purworejo. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara yang kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak di Kabupaten Purworejo telah terlaksana sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut. Namun implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan menemui kendala dalam pengelolaan perpustakaan umum daerah dan kendala dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa. Ada beberapa solusi yang ditawarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengatasi kendala tersebut.</i></p>

### PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang akan mewarisi dan melanjutkan nilai-nilai, tradisi, serta kemajuan yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Anak dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Poerwadarminta, 1990:11). Serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Maka dari itu, perlu adanya perhatian dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, dan pembinaan moral bagi anak-anak. Sehingga negara dapat memastikan keberlanjutan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan anak-anak menjadi generasi penerus bangsa, adalah dengan meningkatkan kesadaran literasi anak-anak. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Literasi juga mencakup kemampuan seseorang untuk berpikir kritis, menganalisis data, dan mengkomunikasikan ide-ide mereka secara efektif melalui kalimat (Budiharto, 2018:165). Namun saat ini Indonesia sedang berada dalam keadaan yang darurat literasi dengan faktor penyebab dapat dari faktor eksternal maupun faktor internal (Mulasih, 2020:19-20). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Program of International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, Indonesia menempati peringkat ke-68 dari 81 negara dengan skor; matematika (379), sains (398), dan membaca (359) (Syamsir Alam, <https://mediaindonesia.com/opini/638003/hasil-pisa-2022-refleksi-mutupendidikan-nasional-2023>, diakses pada 03 Februari 2024 pukul 15.50).

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak adalah melalui perpustakaan. Karenanya, peran dari perpustakaan sangat besar dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan serta pendidikan masyarakat (Adha, et al., 2022:33). Menurut Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa “*Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka*”. Perpustakaan dibentuk dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, perpustakaan memiliki beberapa cara guna meningkatkan kesadaran literasi anak-anak yakni dengan

membangun kesadaran minat baca dan membangun kesadaran pentingnya membaca (Inawati 2020:10).

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran literasi melalui pembentukan perpustakaan. Pembentukan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling dapat menjadi wujud peran pemerintah terkhusus pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran literasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu perpustakaan dan kesadaran literasi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan desa/kelurahan juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi (Agus Wahdian & Framz Hardiansyah, 2023:306). Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk perpustakaan baik perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, maupun perpustakaan desa untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dan desa dapat menjadikan aturan tersebut sebagai dasar untuk menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran literasi anak-anak dan mendorong budaya membaca. Walaupun Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Kabupaten Purworejo, implementasi dari peraturan daerah ini belumlah dilaksanakan secara optimal dan merata. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mengimplementasikan peraturan ini di masyarakat. Implementasi yang belum optimal dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan dianggap akan mempengaruhi tingkat literasi masyarakat terkhusus anak-anak di Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang bagaimana Kabupaten Purworejo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak. Serta hambatan yang ditemukan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu maupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2010: 43). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak di Kabupaten Purworejo**

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran literasi masyarakat. Perpustakaan dapat menjadi sarana dalam strategi meningkatkan kesadaran literasi. Peran penting dari perpustakaan yaitu sebagai penyedia buku dan sebagai pusat ruang baca yang dapat dipergunakan pada kegiatan literasi. Melalui perpustakaan anak-anak dapat membaca dan berdiskusi dengan teman mengenai buku yang menarik minatnya (Hanum Hanifah Sukma, 2021:15).

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang ditujukan untuk perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan. Sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai ketentuan

dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing masing. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan agar dapat menjadi dasar pembentukan perpustakaan di wilayah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan di Daerah;
- h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- i. melakukan penilaian angka kredit pustakawan; dan
- j. menyelenggarakan pojok baca.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah sejak lama sadar akan pentingnya literasi bagi masyarakatnya. Maka dari itu pembentukan perpustakaan telah dilakukan sejak tahun 1980. Perpustakaan Kabupaten Purworejo pada mulanya merupakan “Perpustakaan Contoh Daerah Tingkat II” yang terbentuk berdasarkan hasil kerjasama antara pusat pembinaan dan pengembangan perpustakaan Dep. P & K Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Purworejo. Serta diresmikan berdirinya pada tanggal 30 November 1980 oleh Menteri P & K. Perpustakaan tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan menempati gedung eks Rumah Dinas Bupati Purworejo. Pada saat itu bernama “Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II”. Namun mulai tahun 1991 perpustakaan digeser menempati bagian ruang aula bekas Rumah Dinas Eks. Kawedanan

Kutoarjo, dengan perubahan nama menjadi “Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo”. Tanggal 18 Oktober 2008 perpustakaan bergabung dengan Kantor Arsip dengan nama Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo. Kondisi ruang aula bekas Rumah Dinas Eks. Kawedanan Kutoarjo yang digunakan untuk layanan perpustakaan sudah tidak layak. Pada akhir tahun 2018, Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Purworejo direlokasi menjadi satu atap dengan Depo Arsip. Pada November 2022, Perpustakaan Umum Kabupaten Purworejo resmi memiliki Gedung Layanan baru yang representative. Diresmikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Bupati Purworejo. Perpustakaan Umum Daerah ini terletak di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pembentukan perpustakaan umum daerah telah memenuhi syarat-syarat yang tertuang pada Pasal 11 Ayat (2) yang diantaranya sebagai berikut:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan;
- e. memiliki standar pelayanan; dan
- f. memiliki standar pengelolaan

Koleksi perpustakaan mencakup berbagai jenis bahan, termasuk buku cetak, majalah, jurnal ilmiah, e-book, buku audio, DVD, CD, dan sumber daya digital lainnya, seperti basis data online, e-journal, dan situs web. Koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo adalah 31.363 buku. Buku-buku yang berada di perpustakaan akan bertambah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan yang menyebutkan bahwa “*Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, perpustakaan daerah, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan desa/ kelurahan wajib menambah koleksi per tahun*”. Penambahan koleksi dilakukan melalui pembelian, sumbangan buku karangan anak-anak sekolah, dan hibah dari perpustakaan nasional. Tenaga perpustakaan adalah orang yang bekerja di perpustakaan dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada penggunaannya. Pada Pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa “*Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan*”. Pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo tersedia 7 (tujuh) orang pustakawan dan 8 (delapan) orang tenaga teknis. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan mengharuskan setiap perpustakaan untuk memiliki sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang terdapat di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan. Perpustakaan ini menempati bagian ruang aula bekas Rumah Dinas Eks. Kawedanan Kutoarjo. Gedung perpustakaan memiliki dua lantai. Seluruh lantai 1 (satu) digunakan untuk penyimpanan buku-buku dan ruang membaca. Sedangkan lantai 2 (dua) dapat digunakan sebagai tempat BIMTEK (bimbingan teknis). Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo juga menyediakan beberapa ruangan yang digunakan untuk membaca, mulai dari ruang baca umum, ruang baca anak-anak, ruang baca disabilitas dan ruang buku disabilitas. Hal ini dimaksudkan bahwa semua orang dapat mengakses perpustakaan. Pembuatan ruang-ruang baca ini memperhatikan pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja. Selain ruangan Perpustakaan Umum Daerah juga menyediakan taman-taman beserta gazebo-gazebo di luar ruangan untuk kegiatan membaca. Perabotan dan peralatan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikatakan lengkap. Perabot dan peralatan tersebut diantaranya sebagai berikut: rak buku, meja dan kursi, akses internet, papan pengumuman, alat-alat audiovisual, meja referensi, dan alat pencarian dan katalogisasi.

Sumber pendanaan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta dilaksanakan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggungjawab. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk pembinaan perpustakaan dan pelestarian perpustakaan. Kegiatan pembinaan perpustakaan mencakup pengelolaan perpustakaan dan gemar membaca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seringkali mendapatkan bantuan dari pihak luar yang bertindak sebagai sponsor kegiatan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pihak luar dapat dari BUMD atau BUMN dan bantuan yang diterima bukan berupa uang melainkan berbentuk souvenir atau dorprize.

Standar pelayanan dari perpustakaan umum daerah mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut ini merupakan standar pelayanan yang diterapkan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo:

- a. Perpustakaan mudah diakses oleh semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas
- b. Perpustakaan menyediakan koleksi yang relevan dan beragam, sesuai dengan kebutuhan

dan minat pengguna

- c. Perpustakaan menyediakan akses yang mudah dan cepat ke sumber daya digital.
- d. Perpustakaan menyediakan layanan referensi dan bantuan penelusuran yang membantu pengguna dalam mencari informasi, menemukan sumber daya yang tepat, dan melakukan riset atau studi.
- e. Perpustakaan menyelenggarakan program-program dan acara-acara yang mendukung pendidikan, budaya, dan sosial masyarakat.
- f. Perpustakaan menyediakan proses peminjaman dan pengembalian yang mudah dan cepat.
- g. Perpustakaan menyediakan lingkungan yang nyaman dan ramah.
- h. Perpustakaan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, standar pengelolaan perpustakaan umum daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Umum Daerah dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- b. Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- c. Pengendalian yang dilakukan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo melalui koordinasi, baik melalui meeting atau rapat-rapat, serta pengelolaan yang biasanya dilakukan dengan wawancara dengan pengunjung perpustakaan.
- d. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo melakukan kerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah lain, seperti dinas pendidikan, serta dengan komunitas melalui bantuan buku dan sarana prasarana
- e. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo melakukan promosi melalui sosial media dan strategi promosi lainnya, serta terbuka untuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan.
- f. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo memiliki kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan melakukan pengarahan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

Maka dari itu, standar pengelolaan perpustakaan umum daerah Kabupaten Purworejo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan



pengelolaan perpustakaan adalah pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Perpustakaan memiliki peran penting dalam pembudayaan gemar membaca. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan dalam Pasal 27-28, mengatur mengenai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan membangun budaya baca yang kuat di dalam masyarakat dengan pembudayaan gemar membaca. Pembudayaan gemar membaca didasarkan pada prinsip budaya gemar membaca yang meliputi membangun kesadaran akan pentingnya membaca, menyediakan akses yang luas terhadap bahan bacaan, mendorong minat dan kegemaran membaca sejak dini, serta mempromosikan praktik membaca secara berkelanjutan dalam berbagai lapisan masyarakat. Pembudayaan gemar membaca diperlukan untuk mencerdaskan masyarakat dan membangun masyarakat yang cerdas dan berkualitas (I Ketut Artana, 2015:19). Maka dari itu untuk mendukung pembudayaan gemar membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai program yang dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran literasi anak-anak di wilayah Kabupaten Purworejo dengan menggunakan perpustakaan. Program-program tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Program "Berjibaku" atau Program Wajib Baca Buku: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo melalui Bidang Perpustakaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo menggelar program unik yang bertajuk "Berjibaku" untuk mendorong minat baca pelajar. Program mengharuskan siswa-siswa dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas untuk datang dan membaca buku di perpustakaan.
- b. Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo terus menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap literasi dengan pelaksanaan layanan perpustakaan keliling, Pelaksanaan perpustakaan keliling telah dilakukan di 41 titik yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo.
- c. Safari Perpustakaan Gema Literasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengadakan Safari Perpustakaan Gema Literasi kepada siswa untuk meningkatkan literasi. Selain memperkenalkan terkait baca dan tulis, kegiatan ini juga mengadakan kegiatan pelatihan pelatihan untuk warga desa. Hal ini karena perpustakaan di Kabupaten Purworejo merupakan perpustakaan yang bersifat sosial. Sehingga tidak hanya fokus terhadap baca dan tulis melainkan juga kegiatan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan safari perpustakaan sarasannya Desa / Kelurahan yang merah atau miskin

dan yang stunting. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pelatihan dan mencerdaskan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh berita hoax serta dapat mengembangkan potensi dirinya.

Selain program-program tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Bidang Perpustakaan setiap tahunnya mengadakan berbagai acara-acara yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak-anak di wilayah Kabupaten Purworejo. Acara-acara tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Lomba bercerita

Lomba bercerita adalah acara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak. Lomba bercerita dapat meningkatkan minat anak untuk membaca, bukan hanya untuk memperoleh hadiah, tetapi juga untuk kebutuhan perkembangan anak.

b. Pameran buku-buku

Pameran buku menyediakan kesempatan bagi anak-anak untuk melihat, menyentuh, dan menjelajahi berbagai macam buku berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan minat mereka dalam membaca dan menumbuhkan kebiasaan membaca yang baik.

c. Penghargaan duta baca

Penghargaan duta baca memberikan pengakuan kepada anak-anak yang menunjukkan minat dan dedikasi dalam membaca. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk terus membaca dan meningkatkan keterampilan literasi mereka. Melalui penghargaan duta baca, anak-anak belajar bahwa membaca adalah suatu prestasi yang dihargai dan penting. Hal ini dapat membantu membangun kecintaan mereka pada membaca dan menumbuhkan kebiasaan membaca yang baik sejak dini.

Peran masyarakat dalam rangka pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sangat diperlukan. Kunci kesuksesan dari program-program perpustakaan ada pada partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat membantu perpustakaan dengan secara aktif memanfaatkan layanan yang disediakan, seperti meminjam buku, menggunakan sumber daya digital, atau menghadiri acara-acara yang diadakan perpustakaan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan perpustakaan, semakin terlihat pentingnya peran perpustakaan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, dalam memanfaatkan layanan yang tersedia baik itu berupa perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan keliling belum dipergunakan secara optimal oleh masyarakat. Setiap harinya hanya ada sekitar 15 hingga 25 orang yang mempergunakan ruang

baca baik ruang baca umum, ruang anak-anak, dan ruang disabilitas untuk membaca. Masyarakat cenderung berkunjung ke Perpustakaan Umum Daerah hanya untuk menggunakan WiFi yang tersedia. Selain itu banyak masyarakat yang datang ke perpustakaan umum daerah hanya memanfaatkan gazebo-gazebo yang ada di sekitar gedung. Layanan perpustakaan keliling yang beroperasi juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Namun terkadang layanan perpustakaan keliling tidak diterima baik oleh siswa-siswa bahkan pihak sekolah. Siswa-siswa seringkali tidak tertarik untuk membaca buku-buku yang tersedia di mobil perpustakaan keliling. Serta pihak sekolah yang tidak mengarahkan siswa-siswanya untuk membaca buku-buku yang dibawa oleh perpustakaan keliling. Sehingga karena siswa-siswa yang kurang tertarik untuk membaca dan pihak sekolah yang terkesan tidak peduli dengan adanya layanan perpustakaan keliling membuat tujuan dari layanan ini untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak terhambat.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pojok baca. Pojok baca berperan sebagai sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran literasi, terutama di era digital. Pembuatan pojok baca di fasilitas publik adalah inisiatif yang luar biasa untuk meningkatkan kesadaran literasi anak-anak. Fasilitas publik sering kali menjadi tempat untuk berinteraksi sosial. Ini membantu membangun komunitas literasi yang kuat di sekitar mereka. Selain itu, anak-anak akan memiliki akses yang mudah dan nyaman untuk membaca. Mereka tidak perlu pergi jauh atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan buku. Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki layanan penyediaan pojok baca digital di fasilitas-fasilitas publik yang tersebar di Kabupaten Purworejo. Layanan ini bernama “POCADI” atau Pojok Baca Digital. Layanan POCADI ini baru tersedia di tahun 2023 dan tersebar di 4 (empat) titik di Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan layanan POCADI belumlah dapat dilaksanakan secara maksimal di seluruh fasilitas umum Kabupaten Purworejo. Hal ini karena akses internet yang belum stabil sehingga memerlukan peningkatan infrastruktur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo seringkali melakukan promosi yang ditujukan untuk membantu menarik perhatian masyarakat terhadap Perpustakaan Umum Daerah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan cetak, dan acara komunitas. Promosi Perpustakaan Umum Daerah dapat membantu membentuk kebiasaan membaca yang

positif di masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan mewajibkan desa untuk mempunyai perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk mendukung budaya gemar membaca. Serta untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa, taman bacaan atau pojok baca, desa wajib mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan. Kabupaten Purworejo sendiri terdiri dari 494 desa, akan tetapi hanya ada 51 desa di Kabupaten Purworejo yang telah membentuk perpustakaan desa sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari jumlah desa di Kabupaten Purworejo yang telah menyelenggarakan perpustakaan desa, tepatnya hanya 10,3% dari total desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan akses penduduk desa terhadap fasilitas perpustakaan, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang penting bagi masyarakat setempat. Upaya untuk meningkatkan jumlah perpustakaan desa dapat membantu meningkatkan literasi dan pendidikan di wilayah tersebut. Perpustakaan desa dapat dijadikan sarana bagi anak-anak untuk memperoleh informasi melalui kegiatan literasi

## **2. Hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak di Kabupaten Purworejo**

Hambatan-hambatan yang muncul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan. Menurut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat 2 (dua) hambatan yang muncul dalam mengimplementasikan peraturan daerah ini, yakni pertama, hambatan dalam mengelola perpustakaan daerah dan kedua, hambatan dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan desa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menyampaikan beberapa solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul.

### **a. Hambatan dalam mengelola Perpustakaan Umum Daerah**

#### **1) Jumlah buku yang terbatas**

Jumlah buku yang terbatas di perpustakaan umum daerah dapat berpengaruh terhadap

kesadaran literasi anak-anak. Hal ini dikarenakan jumlah buku yang terbatas dapat membatasi akses anak-anak terhadap berbagai jenis materi bacaan. Selain itu, kurangnya variasi dalam koleksi buku dapat menyebabkan anak-anak kurang terpapar pada berbagai genre, topik, dan jenis tulisan, yang dapat menghambat perkembangan minat dan kesadaran literasi mereka. Selain itu, jumlah buku yang terbatas juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk membaca. Mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan buku yang mereka inginkan atau bahkan tidak dapat mengaksesnya sama sekali, yang dapat menghambat perkembangan kemampuan membaca dan literasi mereka. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi jumlah buku yang terbatas di perpustakaan umum daerah yakni dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan akses ke buku elektronik (e-book). Tenaga perpustakaan juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap koleksi buku untuk memastikan bahwa buku-buku yang tersedia masih relevan dan diminati oleh pengguna. Selain itu, dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran perpustakaan.

## 2) Kesadaran membaca anak-anak yang masih rendah

Kesadaran membaca yang rendah dapat berdampak langsung pada tingkat kesadaran literasi anak-anak. Anak-anak dengan kesadaran membaca yang rendah cenderung memiliki tingkat literasi yang rendah. Anak-anak yang tidak terbiasa membaca cenderung memiliki keterampilan membaca yang buruk. Mereka akan menghadapi kesulitan dalam menguraikan kata-kata, memahami makna teks, dan membuat kesimpulan dari apa yang mereka baca. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membaca anak-anak yakni sebagai berikut menumbuhkan minat baca sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan membacakan buku untuk anak sejak usia dini. Selain itu kegiatan membaca dapat dilakukan sebagai aktivitas di dalam keluarga. Serta, perlunya menjadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan, Adanya apresiasi dan penghargaan kepada anak-anak yang gemar membaca. Pemberian apresiasi dan penghargaan ini dapat membuat anak-anak termotivasi. Kesadaran membaca anak-anak dapat ditingkatkan dengan adanya kerjasama dengan sekolah untuk menanamkan budaya membaca di sekolah dan mengadakan program literasi yang menarik bagi anak-anak. Serta perlu meningkatkan akses terhadap buku dengan menyediakan buku-buku yang berkualitas yang menarik dan sesuai dengan minat anak-anak.

## 3) Jumlah tenaga perpustakaan yang terbatas

Jumlah tenaga perpustakaan yang terbatas dapat berpengaruh pada tingkat kesadaran literasi

anak-anak. Tenaga perpustakaan yang terbatas tidak dapat memberikan dukungan dan bantuan yang cukup kepada anak-anak dalam pengembangan keterampilan literasi. Anak-anak seringkali membutuhkan bantuan dalam memilih buku yang sesuai dengan minat dan tingkat bacaan mereka, serta bantuan dalam memahami dan menganalisis materi bacaan. Selain itu, jumlah tenaga yang terbatas dapat membatasi kemampuan perpustakaan untuk menyelenggarakan program-program literasi khusus untuk anak-anak, seperti cerita waktu, klub buku, atau workshop menulis. Sedangkan program-program ini penting untuk meningkatkan minat anak-anak dalam membaca dan meningkatkan keterampilan literasi mereka. Terbatasnya jumlah tenaga perpustakaan juga akan menimbulkan kesulitan dalam mengelola koleksi buku dan materi bacaan lainnya. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi jumlah tenaga perpustakaan yang terbatas di perpustakaan umum daerah salah satunya dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem manajemen perpustakaan otomatis, aplikasi perpustakaan, atau platform daring untuk layanan peminjaman dan penelusuran dapat membantu mengurangi beban kerja staf. Serta dapat membuka kesempatan bagi sukarelawan lokal untuk berkontribusi di perpustakaan dapat membantu meningkatkan kapasitas tenaga kerja tanpa harus menambah biaya. Selain cara-cara tersebut, perpustakaan perlu mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Hal ini dapat melibatkan peninjauan kembali proses kerja, penghapusan tugas yang tidak penting, atau pengoptimalan alokasi waktu dan tenaga staf.

b. Hambatan dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan desa

1) Desa-desa yang belum memprioritaskan perpustakaan desa

Perbedaan dalam prioritas antara Pemerintah desa dan Pemerintah Daerah dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam pembentukan perpustakaan desa. Pemerintah desa memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, dan perhatian, yang membuatnya cenderung memprioritaskan masalah yang lebih mendesak atau yang langsung terlihat oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Tentang Desa menyebutkan bahwa desa harus menyelenggarakan perpustakaan. Dana desa dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan perpustakaan desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah desa yang tidak memprioritaskan dana desa untuk pembentukan perpustakaan desa. Padahal, idealnya perpustakaan desa haruslah mendapatkan perhatian yang lebih besar dan termasuk kategori pelayanan dasar, seperti juga kesehatan dan kesejahteraan (Purwanto, P., & Khoiriah, S, 2020:40). Desa-desa yang belum memprioritaskan perpustakaan desa akan berdampak pada kesadaran literasi anak-anak di desa. Hal ini karena anak-anak tidak memiliki

akses ke sumber daya informasi yang luas dan beragam. Sehingga mereka tidak dapat mengembangkan keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk melakukan upaya persuasif dan pendekatan yang berkelanjutan kepada pemerintah desa dan pemerintah setempat. Penyuluhan yang baik tentang manfaat jangka panjang dari perpustakaan desa, serta cara integrasi dengan prioritas yang sedang dihadapi, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap proyek perpustakaan desa. Secara institusi dapat melibatkan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan termasuk juga Bappeda untuk setiap wilayah-wilayahnya. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan yayasan lokal, juga bisa membantu mengumpulkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan pembentukan perpustakaan desa

## 2) Internet dan handphone

Teknologi terkhusus handphone dapat menghambat kesadaran literasi anak-anak. Anak-anak dapat terjebak dalam penggunaan handphone secara berlebihan, menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca atau belajar dengan menggunakan media sosial atau bermain game. Hal ini dapat menghambat motivasi mereka untuk membaca atau belajar hal-hal baru. Serta aplikasi dan permainan pada handphone sering kali dirancang untuk memikat perhatian pengguna dengan penggunaan warna, suara, dan efek visual yang menarik. Hal ini dapat mengganggu kemampuan anak-anak untuk berkonsentrasi pada membaca atau memahami teks dengan baik (Yuli Sawitri, et.al., 2019:696). Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah internet dan handphone yang dapat menghambat kesadaran literasi anak melalui perpustakaan desa, sebagai berikut perpustakaan desa dapat menggunakan teknologi yang lebih efektif dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran literasi anak. Peran orang tua dan guru untuk membantu anak menggunakan teknologi dengan cara yang lebih bijak dan lebih efektif. Perpustakaan desa dapat mengembangkan program edukasi yang lebih spesifik dan lebih relevan dengan kebutuhan anak. Serta dapat menggunakan sumber daya yang lebih luas dan lebih beragam untuk meningkatkan kesadaran literasi anak. Perpustakaan desa juga dapat mengembangkan budaya literasi yang lebih kuat dan lebih mendalam di masyarakat. Budaya ini dapat mencakup nilai-nilai yang lebih positif dan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran literasi anak.

## 3) Pemerintah desa yang kurang kreatif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa

Pemerintah desa yang kurang kreatif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan

desa dapat memiliki dampak negatif pada kesadaran literasi anak-anak. Pemerintah desa yang tidak kreatif dalam pengelolaan perpustakaan dapat menghambat akses anak-anak ke berbagai sumber informasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran literasi mereka. Anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mengakses buku, artikel, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep dasar dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Kreativitas yang kurang dari pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan dapat mengurangi motivasi anak-anak untuk membaca dan belajar. Anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan kesadaran literasi mereka. Kreativitas pemerintah desa kurang dapat pula menyebabkan partisipasi masyarakat berkurang. Masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran literasi, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk terlibat dalam pengembangan perpustakaan.

Pengelola perpustakaan desa harus memiliki strategi yang jitu agar mendapatkan hasil yang maksimal, yang meliputi aspek kelembagaan perpustakaan, gedung/ruang perpustakaan, perabot dan perlengkapan perpustakaan, tenaga pengelola perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, anggaran perpustakaan, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan beberapa cara yakni diantaranya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas pemerintah desa tentang pentingnya literasi anak-anak dan peran perpustakaan desa dalam mencapai tujuan ini. Membangun kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan lokal, atau individu yang peduli terhadap literasi anak-anak. Perlunya mengembangkan rencana strategis yang jelas dan terukur untuk pengelolaan perpustakaan desa dan peningkatan kesadaran literasi anak-anak. Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait perpustakaan desa dan program-program literasi. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan dan promosi perpustakaan desa dan program-program literasi. Pemberian penghargaan atau insentif kepada petugas pemerintah desa yang berhasil mengelola perpustakaan desa dengan baik dan meningkatkan kesadaran literasi anak-anak.

#### 4) Kurangnya minat masyarakat

Kurangnya minat masyarakat terhadap perpustakaan desa dapat memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesadaran literasi anak. Ketika masyarakat tidak tertarik atau jarang menggunakan perpustakaan desa, anak-anak akan memiliki akses yang terbatas terhadap buku dan



materi bacaan lainnya. Kurangnya minat dalam perpustakaan desa bisa mencerminkan kurangnya minat dalam belajar secara umum. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana membaca dan belajar tidak ditekankan mungkin lebih cenderung untuk mengalami penurunan minat dalam pendidikan. Membaca bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan pemahaman tentang dunia. Sehingga Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari minat masyarakat terhadap perpustakaan desa antara lain: mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran tentang pentingnya literasi anak dan peran perpustakaan desa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. Perluasan aksesibilitas perpustakaan desa dengan membuka perpustakaan pada waktu yang lebih fleksibel sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Perpustakaan desa memiliki koleksi bahan bacaan yang beragam dan menarik bagi anak-anak. Adanya kolaborasi dengan sekolah-sekolah setempat dan organisasi komunitas untuk mengadakan program-program membaca bersama. Pemanfaatan teknologi dan melibatkan orang tua dan anggota masyarakat lainnya dalam kegiatan literasi anak.

#### 5) Perubahan generasi

Perubahan generasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap perpustakaan desa dan kesadaran literasi anak. Dengan berkembangnya teknologi dan pergeseran preferensi masyarakat terhadap sumber daya informasi dan hiburan, perpustakaan desa harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut untuk tetap relevan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran literasi anak. Pertama, perubahan generasi dapat berdampak pada cara masyarakat mengakses informasi. Dengan adanya teknologi, masyarakat sekarang dapat mengakses informasi melalui berbagai platform digital, seperti internet dan aplikasi mobile. Hal ini dapat membuat perpustakaan desa harus lebih inovatif dalam menyajikan informasi dan meningkatkan akses ke sumber daya informasi yang lebih luas dan beragam. Kedua, perubahan generasi dapat berdampak pada cara masyarakat memperlakukan informasi. Dengan adanya teknologi, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses dan membagikan informasi, namun juga dapat meningkatkan risiko kehilangan konteks dan akurasi informasi. Perpustakaan desa harus lebih berfokus pada pengembangan kemampuan literasi informasi yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum dibagikan. Ketiga, perubahan generasi dapat berdampak pada cara masyarakat memperlakukan perpustakaan desa. Dengan adanya teknologi, masyarakat sekarang dapat dengan mudah mengakses informasi melalui

berbagai platform digital, namun juga dapat meningkatkan kebutuhan akan perpustakaan desa sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan literasi informasi yang lebih luas dan beragam. Perpustakaan desa harus lebih berfokus pada pengembangan kemampuan literasi informasi yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan desa sebagai sumber daya informasi yang lebih luas dan beragam.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan generasi terhadap perpustakaan desa dan kesadaran literasi anak, yakni menciptakan program literasi digital yang menarik dan edukatif untuk anak-anak, kemudian memastikan perpustakaan desa mudah diakses oleh anak-anak dengan menyediakan transportasi publik yang terjangkau atau bahkan layanan perpustakaan keliling untuk mencapai masyarakat yang lebih terpencil. Tersedia koleksi bahan bacaan yang beragam dan menarik untuk berbagai kelompok usia dan minat. Ini termasuk buku-buku bergambar, novel, majalah, dan materi bacaan digital. Pemanfaatan platform media sosial untuk mempromosikan perpustakaan desa dan kegiatan literasi anak-anak. Serta melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi anak-anak dengan mengadakan sesi baca bersama di perpustakaan desa atau memberikan rekomendasi buku yang sesuai untuk dibaca bersama di rumah. Perlu mengadakan program penghargaan atau insentif untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan literasi anak-anak.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran literasi anak dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pembentukan perpustakaan umum daerah, telah memenuhi syarat-syarat yakni diantaranya: koleksi perpustakaan yang tersedia berjumlah 31.363 buku. Tenaga perpustakaan yang berjumlah 7 (tujuh) orang pustakawan dan 8 (delapan) orang tenaga teknis. Sarana dan prasarana dari perpustakaan ini juga telah terdiri dari lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan. Sumber pendanaan penyelenggaraan perpustakaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Purworejo juga telah memiliki standar layanan pelayanan dan pengelolaan, Perpustakaan memiliki peran penting dalam pembudayaan gemar membaca tersedia berbagai program yang diantaranya Program “Berjibaku”, Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling, dan Safari Perpustakaan Gema Literasi. Selain itu, terdapat pula acara-

acara mulai dari kegiatan lomba bercerita, pameran buku-buku, dan penghargaan duta baca. Sehingga dapat dilihat bahwa peran masyarakat merupakan kunci dari kesuksesan dari program dan acara yang dilaksanakan. Namun pada kenyataannya peran serta masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan fasilitas layanan perpustakaan baik perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan keliling. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menyediakan layanan POCADI yang baru dilaksanakan pada tahun 2023 dan tersebar di 4 (empat) titik di wilayah Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan juga mewajibkan desa-desa di wilayah Kabupaten Purworejo untuk mempunyai perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk mendukung budaya gemar membaca. Namun kenyataannya dari 494 desa hanya ada 51 desa di Kabupaten Purworejo yang telah membentuk perpustakaan desa. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari desa di Kabupaten Purworejo yang telah menyelenggarakan perpustakaan desa.

Hambatan-hambatan dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan terbagi menjadi 2 (dua) yakni hambatan dalam mengelola perpustakaan umum daerah dan hambatan dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan desa. Hambatan dalam mengelola Perpustakaan Umum Daerah diantaranya sebagai berikut: jumlah buku yang terbatas, kesadaran membaca anak-anak yang masih rendah, dan jumlah tenaga perpustakaan yang terbatas. Sedangkan hambatan dalam menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan desa diantaranya sebagai berikut: desa-desa yang belum memprioritaskan pembentukan perpustakaan desa; internet dan handphone; Pemerintah desa yang kurang kreatif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa; kurangnya minat dari masyarakat; dan perubahan generasi.

## **SARAN**

- a. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu memantau dan menilai secara berkala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan ini dalam meningkatkan kesadaran literasi anak dan membuat perubahan yang diperlukan.
- b. Pemerintah desa dapat mengambil inisiatif atau mulai memprioritaskan untuk mendirikan

perpustakaan desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017. Ini melibatkan identifikasi ruang yang tepat, alokasi anggaran, dan penyediaan koleksi buku yang relevan dan bermanfaat untuk anak-anak.

- c. Masyarakat diharapkan untuk aktif memanfaatkan perpustakaan umum daerah maupun perpustakaan desa sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Serta mendukung dan berpartisipasi dalam program-program literasi maupun program sosial yang diselenggarakan oleh perpustakaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Journals:**

- Adha, R. P., Koeswara, H., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perpustakaan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Minat Baca Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 20(10), 33-38.
- Artana, I. K. (2015). Perpustakaan, masyarakat, dan pembudayaan gemar membaca. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 1(1).
- Budiharto, T. S. (2018). Literasi Sekolah Sebagai Upaya Penciptaan Masyarakat Pembelajar Yang Berdampak Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya, dan Kependidikan*, 153-166.
- Inawati, I. (2022). Peran Perpustakaan Sekolah dalam Menciptakan Budaya Literasi Siswa pada Jenjang Pendidikan Menengah. *Literatify: Trends in Library Developments*, 3(1), 1-13.
- Mulasih, W. D. (2020). Urgensi Budaya Literasi Dan Upaya Menumbuhkan Minat Baca. *Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 19-23.
- Purwanto, P., & Khoiriah, S. (2020). Manajemen perpustakaan desa.
- Sawitri, Y., Yannaty, I. A., Widyastika, S. I., Harumsih, T. D., & Musyarofah, H. F. (2019, December). Dampak penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak usia dini. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP* (Vol. 1, pp. 691-697).
- Sukma, H. H. (2021). Strategi Kegiatan Literasi Dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Varidika*, 33(1), 11-20.
- Wahdian, A., & Hardiansyah, F. (2023). Meningkatkan Literasi Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Pembentukan Perpustakaan Desa di Balai Desa Batu Putih Sumenep. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 305-312.

### **Authored Books:**

- Poerwadarminta, W. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers. Waluyadi. (2009). Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

### **Legal Documents**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan